

**Inovasi Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa :
Electronic Village Budgeting (E-Village Budgeting) untuk Menciptakan
Good Governance di Kabupaten Banyuwangi**

Ratih Kurnia Ramadhanny

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang

Handphone +6282234308904

ABSTRACT

Since the enactment of Regulation (UU) number 6 year 2014 about Village, each village will be given Rp. 1 billion. This village funds are prioritized for the development and empowerment of village communities. Under supervision of the use of village funds, the government of Banyuwangi through Village and Community Empowerment Office created an integrated village budgeting system by online. This system is called E-Village Budgeting (E-VB). This system is purposefully created for budget transparency, providing convenience in administrative accountability, financial control of the district level, as well as the ease of financial accountability and evaluation.

This study is conducted through mixed method between quantitative and qualitative research by using observation data, interviews, documentations and questionnaires to explain in detail the real situation and use triangulation of data sources, methods and theories. Qualitative method is used to explain in detail about the innovation of village financial governance, while quantitative research method is used as supporting to explain the situation in society.

Based on the study, the result shows that E-VB application system in accordance with the theory and innovation concept. This system is an innovation designed to facilitate village government's financial governance by utilizing the internet network in every village. The implementation of E-VB system has been successful with less constraints.

Based on the researcher's observation, the problem is servers are often down, especially when many village apparatus are using the E-VB application concurrently. In the future, the Government of Banyuwangi must increase the number of existing servers for the future E-VB application system can be operated more appropriately.

Keywords: Innovation of Village Government Financial Governance, E-Village Budgeting

PENDAHULUAN

Kesuksesan didalam mengelola pemerintah desa yang berujung pada peningkatan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa, untuk era sekarang ini masih menjadi suatu hal yang bisa dibilang sangat langka. Dahulu, pemerintahan desa memiliki peran atau wewenang yang kecil di dalam pembangunan. Namun, sejak dikeluarkannya UU Desa No 6 Tahun 2014 pemerintah desa mulai diberi kejelasan tentang status dan kepastian hukum dan sejak diberlakukannya PP No 60 Tahun 2014 dan PP No 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa

Bersumber dari APBN, setiap desa akan diberi dana desa sebanyak Rp 1 Miliar, yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Di dalam pengawasan penggunaan dana desa, pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat sistem penganggaran desa yang terintegrasi dalam jaringan atau *online* guna menuju transparansi penganggaran dan *monitoring* pembangunan di pelosok desa. Sistem penganggaran ini disebut dengan *E-Village Budgeting* (E-VB) dan *E-Village Monitoring* (E-VM). Sistem ini akan menyinergikan keuangan dan pembangunan ditingkat desa dengan kabupaten, sehingga akan tercipta sebuah keselarasan sekaligus untuk memberi perlindungan bagi perangkat desa agar dalam pemanfaatan anggarannya bisa efektif dan sesuai aturan.

Dari uraian tersebut, penelitian ini ingin memperdalam kajian mengenai inovasi tata kelola pemerintahan desa, khususnya di dalam melakukan pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa yang digunakan untuk pembangunan melalui *E-Village Budgeting* yang telah dilaksanakan di seluruh desa di Kabupaten Banyuwangi.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode campuran yang menggabungkan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Alasan utama menggunakan *mixed metode* ini karena ingin mendalami fenomena proses yang terjadi di lapangan yang sekaligus ingin mengetahui besaran dampak pengaruh adanya inovasi tata kelola pemerintah desa melalui *E-Village Budgeting*. Dengan menggunakan *mixed metode* akan menghasilkan fakta yang lebih komprehensif di dalam meneliti masalah yang ada. Karena dengan metode ini, peneliti memiliki kebebasan untuk menggunakan semua alat pengumpul data sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan.

Sebelum memasuki pembahasan mengenai inovasi tata kelola pemerintah desa melalui *E-Village Budgeting* maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai konsep inovasi tata kelola pemerintahan, teori *E-Government* dan teori *budgeting*.

Konsep Inovasi Tata Kelola Pemerintahan

Governance atau tata kelola pemerintahan pertama kali muncul di tahun 1989. Kemudian pada tahun yang sama World Bank, mendefinisikan *Governance* sebagai “*the exercise of political power to manage a nation’s affairs*” (pelaksana kekuasaan politik untuk mengelola urusan negara). Seiring dengan perkembangan waktu, istilah *governance* ini selalu mengalami perkembangan hingga saat ini. Glyn Davis dan Michael Keating (1999: 3-5) menjelaskan lebih lanjut mengenai *governance* yang dipahami sebagai sesuatu yang luas dan memiliki konsep yang lebih fundamental apabila dibandingkan dengan pemerintah. Hal ini dikarenakan pemerintah berkaitan dengan hubungan antar bagian dalam sistem politik sebagai sebuah kesatuan kelembagaan.

Definisi inovasi tata kelola pemerintahan menurut Chhotray dan Stoker (2009:3) adalah sebuah proses perubahan menuju tata kelola yang lebih baik dengan melibatkan banyak aktor didalam suatu organisasi masyarakat. Inovasi tata kelola pemerintahan ini mencakup empat elemen utama yakni: inovasi *rule* atau aturan main, inovasi kolektivitas; inovasi di dalam membuat keputusan dan elemen inovasi.

Teori E-Government

Konsep *e-government* telah dijelaskan didalam INPRES No. 3 Tahun 2003 yang berkaitan dengan konsep *e-government* dalam INPRES No. 6 Tahun 2001, dengan lebih menekankan pada strategi pengembangan *e-government* sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas.

Kelancaran arus informasi untuk menunjang hubungan antar lembaga negara, serta untuk menstimulasi partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan kebijakan negara yang baik. Oleh karena itu, pelayanan publik harus transparan, terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas melalui jaringan komunikasi dan informasi.

2. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik.

Pencapaian pengembangan sistem pelayanan yang handal harus ditunjang dengan penataan sistem manajemen. Penataan sistem manajemen dan prosedur kerja pemerintah harus dirancang agar dapat mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara cepat. Penataan ini meliputi sejumlah sasaran secara holistik membentuk konteks bagi pembentukan pemerintahan yang baik.

3. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.

Kemajuan teknologi informasi dan perkembangan jaringan komunikasi dan informasi memberikan peluang yang luas bagi instansi pemerintah untuk memenuhi keperluan tersebut.

4. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.

Pengembangan pelayanan publik tidak perlu sepenuhnya ditangani oleh pemerintah, partisipasi dunia usaha dapat mempercepat pencapaian tujuan strategis *e-government*.

5. Mengembangkan kapasitas sumberdaya manusia pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan *e-literacy* masyarakat.

Perlu adanya upaya peningkatan kapasitas SDM dan penataan dalam pendayagunaan, yang tidak lain berperan sebagai kunci keberhasilan melaksanakan dan pengembangan *e-government*.

6. Melaksanakan pengembangan secara sistematis.

Setiap perubahan berpotensi menimbulkan ketidakpastian, oleh karena itu pengembangan *e-government* perlu direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan dan sasaran yang terukur, sehingga dapat difahami dan diikuti oleh semua pihak.

Teori Budgeting

Budget merupakan sebuah rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan atau pemerintah yang dinyatakan dalam unit atau suatu kesatuan moneter dan berlaku dalam jangka waktu atau periode tertentu pada masa yang akan datang. Berdasarkan pengertian tersebut, budget mengandung empat unsur yang terdiri dari:

- 1) Rencana.

Rencana harus ditentukan terlebih dahulu guna menentukan aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dengan beberapa spesifikasi khusus seperti perencanaan yang harus disusun secara sistematis, berisis seluruh kegiatan perusahaan hingga dinyatakan dalam unit moneter.

- 2) Meliputi seluruh kegiatan perusahaan.

Di dalam menyusun *budget* harus mencakup seluruh kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian yang ada di dalam suatu perusahaan atau pemerintahan.

- 3) Dinyatakan dalam unit moneter.
Maksud dari dinyatakan dalam unit moneter yakni unit yang dapat diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan atau pemerintah yang beragam. Dengan adanya unit moneter perbedaan ini menjadi dapat diseragamkan sehingga, memungkinkan untuk dijumlahkan, diperbandingkan serta dilakukan analisa lebih lanjut.
- 4) Jangka waktu tertentu yang akan datang.
Jangka waktu ini menunjukkan berlakunya *budget* untuk masa yang akan datang. Dalam kaitannya dengan jangka waktu, budget dibagi menjadi beberapa macam, yakni:
 - a) *Budget* strategis: budget yang masa berlakunya untuk jangka panjang, yakni jangka waktu yang melebihi satu periode atau satu tahun.
 - b) *Budget* taktis: *budget* yang masa berlakunya untuk jangka pendek. Untuk *budget* yang masa berlakunya untuk jangka waktu satu periode disebut dengan *budget* periodik. Sedangkan untuk *budget* yang masa berlakunya untuk jangka waktu kurang dari satu periode disebut dengan *budget* bertahap.

PEMBAHASAN

Latar Belakang *E-Village Budgeting*, Aktor yang terlibat dalam pembuatan dan penerapan *E-Village Budgeting*, serta Persiapan awal *E-Village Budgeting*

Latar belakang sistem aplikasi *E-Village Budgeting*, berawal sejak diterbitkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan aturan pelaksanaan lainnya, Pemerintah memberikan kewenangan yang lebih kepada desa untuk bisa mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, yang didalamnya termasuk dalam mengelola dan menggunakan anggaran desa yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp 1 Miliar. Sedangkan selama ini, sebelum diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014, di Kabupaten Banyuwangi saat itu masih banyak dijumpai pengelolaan keuangan desa yang masih jauh dari harapan. berbagai permasalahan pengelolaan keuangan. Beberapa permasalahan lain, seperti :

- a. Pola perencanaan pembangunan yang masih dilakukan dengan cara parsial hanya terbatas untuk tahun anggaran yang berjalan, menyebabkan terhambatnya proses pembangunan di Desa;
- b. Keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia (SDM) aparatur desa dalam segi administrasi dan tata kelola di bidang manajemen keuangan desa, sehingga dapat berdampak pada risiko dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban;
- c. Masih terbatasnya kemampuan keuangan desa dalam menampung aspirasi masyarakat secara maksimal di dalam penganggaran. Pemerintah Desa cenderung menganggarkan program kegiatan dengan metode *incremental budgeting* yang berbasis pada situasi dan fakta yang ada, sehingga berdampak pada kegiatan yang dilakukan menjadi kurang terukur, bahkan terindikasi tumpang tindih antara kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lainnya;
- d. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga mendorong pemerintah desa untuk mampu memberikan data keuangan desanya secara tertib dan akuntabel;
- e. Hanya terdapat kurang dari 10% Desa yang mengirimkan Laporan Pertanggungjawaban secara tepat waktu.

Untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut, maka pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa merasa perlu adanya sebuah

inovasi baru di dalam tata kelola keuangan yang dapat memberikan kemudahan bagi pemerintah desa di dalam melaksanakan kegiatannya dalam keuangan mulai dari proses perencanaan, penatausahaan, perubahan anggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan desa. Sehingga dibuatlah sebuah alat untuk mempermudah pemerintah desa di dalam mengelola keuangannya yang diberi nama (*Electronic Village Budgeting/E-Village Budgeting*).

Sistem aplikasi *E-Village Budgeting* adalah sebuah inovasi baru yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam hal tata kelola keuangan pemerintah desa. Sistem *E-Village Budgeting* ini dapat dikatakan sebagai sebuah inovasi karena merupakan sebuah metode atau pendekatan baru yang digunakan sebagai solusi dari permasalahan yang ada, yakni permasalahan di dalam sistem tata kelola keuangan pemerintah desa agar kedepannya tata kelola keuangan desa Kabupaten Banyuwangi menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Selain itu, *E-Village Budgeting* ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan memperbaiki kinerja pemerintah desa khususnya di dalam tata kelola keuangan. Hal ini sesuai dengan pengertian inovasi menurut Sumarto (2009: 14) yang menyebutkan bahwa inovasi adalah upaya untuk memperkenalkan sesuatu yang baru yang pada umumnya terdiri dari beberapa hal seperti misalnya ide baru, metode baru, pendekatan baru dan berbagai upaya untuk mencari solusi kreatif guna meningkatkan partisipasi dan memperbaiki kinerja pemerintah.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan operasional di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, aplikasi *E-Village Budgeting* ini dikembangkan dengan berbasis *web (intranet)*, sehingga akan sangat memudahkan pengerjaan serta sangat efektif untuk bisa diimplementasikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang memiliki wilayah yang sangat luas dan telah memiliki jaringan intranet sejak tahun 2007. Selain itu, aplikasi ini juga dikembangkan dengan konsep *open sources* dan *open platform* untuk meningkatkan kemandirian Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam pengelolaan aplikasi. Sistem ini menjadi salah satu inovasi untuk mewujudkan *good and clean government* di tingkat pemerintahan desa.

Aktor yang terlibat dalam persiapan dan penerana sistem *E-Village Budgeting*

Ada banyak aktor yang terlibat di dalam penerapan aplikasi *E-Village Budgeting*, yang mana masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsinya di dalam menjalankan sistem *E-Village Budgeting* ini. Inisiatif dibuatnya sistem aplikasi *E-Village Budgeting* dilakukan oleh Dinas pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan beberapa aktor di dalam pembuatan dan penerapannya. Aktor yang terlibat di dalam pembuatan kebijakan dikelompokkan menjadi dua yakni eksekutif dan instansi pemerintah. Yang menjadi eksekutif dalam penerapan sistem aplikasi *E-Village Budgeting* adalah Bupati Banyuwangi. Sedangkan instansi pemerintah yang terlibat dalam penerapan sistem aplikasi *E-Village Budgeting* adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian Kabupaten Banyuwangi, sedangkan di dalam penerapannya, aktor yang terlibat adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian Kabupaten Banyuwangi, Camat se-Kabupaten Banyuwangi serta Kepala desa dan perangkat desa se-Kabupaten Banyuwangi.

Persiapan Awal Sistem *E-Village Budgeting*

Persiapan awal dalam penerapan *E-Village Budgeting* adalah dengan mempersiapkan sumberdaya finansial, pembangunan aplikasi hingga peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah desa, khususnya pemahaman mengenai alur proses dari sistem *E-Village Budgeting* itu sendiri yang disinergikan dengan pengetahuan tentang

manajemen keuangan desa berdasarkan undang-undang yang berlaku. Berikut ini adalah sumber daya yang diperlukan untuk membangun sistem *E-Village Budgeting* :

- a. Sumber daya Financial, dibutuhkan untuk membangun sistem aplikasi *E-Village Budgeting* dan belanja modal penambahan server.
- b. Sumberdaya Teknis, dibutuhkan untuk pengembangan sistem aplikasi serta untuk memaksimalkan jaringan internet di Kabupaten Banyuwangi.
- c. Sumberdaya Manusia, disiapkan dengan memberikan berbagai pelatihan dan pendampingan mengenai sistem aplikasi *E-Village Budgeting* serta membuat klinik konsultasi DD/ADD untuk membantu perangkat desa yang masih mengalami kesulitan.

Selain cara tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, juga memiliki beberapa aksi sebagai kunci dari keberhasilan implementasi sistem *E-Village Budgeting*. Beberapa aksi tersebut antara lain meliputi :

1. Menyelenggarakan pelatihan bagi petugas yang membidangi keuangan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan desa dengan tujuan agar petugas dapat mengoperasikan sistem dengan baik.
2. Menyempurnakan regulasi yang berkaitan dengan aplikasi *E-Village Budgeting* yang harus digunakan oleh pemerintah desa di dalam manajemen keuangan desa.
3. Melimpahkan sebagian wewenang yang dimiliki SKPD terkait kepada camat, khususnya dalam hal verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Kegiatan ini tidak lain bertujuan agar lebih memudahkan dalam melakukan kontrol keuangan desa.
4. Membuat klinik konsultasi DD/ADD dengan tujuan untuk membantu, asistensi Desa yang masih mengalami kesulitan dalam membuat perencanaan, penganggaran maupun penatausahaan keuangan desanya melalui *E-Village Budgeting* dan aparaturnya sebagai verifikator APBDes.

Penerapan Sistem *E-Village Budgeting*

Kondisi Awal Penerapan

Di tahap penerapannya, pasti akan ditemui berbagai kendala terutama bagi aparaturnya pemerintah desa. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui ada beberapa kendala utama yang paling banyak dialami oleh aparaturnya desa diawal penerapan aplikasi *E-Village Budgeting* adalah sebagai berikut :

- 1) Sarana jaringan internet di desa yang masih belum optimal.
- 2) Keterbatasan kemampuan SDM perangkat desa/operator *E-Village Budgeting*
- 3) Kualitas dari sistem aplikasi *E-Village Budgeting* yang masih kurang

Berikut ini adalah upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi untuk mengatasi permasalahan tersebut :

- 1) Penggunaan aplikasi *E-Village Budgeting* dengan sistem *trial and error* yang disesuaikan dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa. Dengan sistem *trial* (mencoba) *and error* (salah) dalam aplikasi *E-Village Budgeting*, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat mengetahui masalah yang ada di dalam aplikasi, yang kedepannya perlu dilakukan perbaikan.
- 2) Meningkatkan Jaringan Internet. Internet merupakan hal pokok yang diperlukan di dalam penerapan aplikasi *E-Village Budgeting*. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menghimbau pemerintah desa untuk bisa meningkatkan sarana prasarana terutama meningkatkan jaringan internet dengan mengalokasikan anggaran

untuk belanja jasa internet. Karena, apabila jaringan internet di setiap desa sudah baik, maka secara otomatis dapat lebih memudahkan kinerja perangkat desa tersebut.

- 3) Peningkatan kapasitas aparatur desa. Peningkatan kapasitas aparatur desa ini menjadi upaya terakhir untuk bisa mengatasi kendala yang terjadi di awal penerapan aplikasi *E-Village Budgeting*. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa ini dilakukan dengan memberikan pelatihan, *refresh*, pendampingan dan klinik bari aparatur pemerintah desa dalam mengoperasikan *E-Village Budgeting*.

Kondisi saat Penerapan Sistem Aplikasi *E-Village Budgeting*

Setelah masuk di tahun kedua penerapan aplikasi *E-Village Budgeting*, ada banyak perubahan yang dirasakan oleh aparatur pemerintah desa yang secara langsung menerapkan sistem, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Weni, Bendahara sekaligus Operator Desa Parangharjo Songgon berikut ini:

“Untuk sekarang, Alhamdulillah sudah tidak ada kesulitan lagi. Setiap tahunnya, E-VB ini selalu disempurnakan. Misalnya, di tahun 2016-2017 RKPDes belum bisa di *entry* ke E-VB, maka pada tahun 2018 ini nanti bisa di *entry* ke dalam E-VB. Selain itu juga jaringan internet menjadi lebih bagus. Untuk saat ini sudah tidak ada kesulitan lagi.”

Hal yang tidak jauh berbeda diungkapkan oleh Bapak Dedi Riswanto, Bendahara Desa Tegalharjo, Glenmore berikut ini :

“Untuk saat ini tidak ada kesulitan sama sekali. Kalaupun tiba tiba ada kendala, biasanya kami langsung menghubungi DPM untuk konsultasi secara langsung melalui telfon.”

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, beberapa perubahan yang mulai dirasakan oleh aparatur desa di penerapan aplikasi *E-Village Budgeting* adalah sebagai berikut :

- 1) Jaringan Internet semakin membaik
- 2) Sistem aplikai *E-Village Budgeting* menjadi lebih baik
- 3) Kemampuan perangkat desa sudah lebih baik

Penilaian Responden terhadap Penerapan Sistem Aplikasi *E-Village Budgeting*

Berdasarkan hasil wawancara dengan 22 aparatur desa, mengenai penerapan sistem *E-Village Budgeting* seluruhnya beranggapan bahwa penerapan sistem aplikasi *E-Village Budgeting* sudah berhasil. Seperti yang dikatakan oleh operator desa Kampunganyar yang menyatakan bahwa “Sistem ini sudah berhasil, karena sudah diterapkan di seluruh desa di Kabupaten Banyuwangi.”

Hal ini juga dapat dilihat dari diagram tersebut yang menunjukkan pendapat responden mengenai penerapan aplikasi *E-Village Budgeting* pada tahun anggaran 2015 hingga saat ini bisa dibilang sudah cukup baik dan berhasil. Ini karena, saat ini sudah tidak ada masalah yang berarti yang dialami oleh responden, bahkan semua responden merasa sangat terbantu dengan adanya aplikasi ini.

Keberhasilan dari penerapan aplikasi ini tidak lain karena kegigihan dari semua aktor yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam sistem aplikasi *E-Village Budgeting*. Masing-masing pemangku kepentingan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing masing dengan baik dan sungguh-sungguh, sehingga hasil yang didapatkan menjadi maksimal. Selain melakukan wawancara dengan responden mengenai sistem *E-Village Budgeting*, peneliti juga melakukan observasi pada saat penelitian berlangsung. Observasi ini

dilakukan pada saat responden menjelaskan bagaimana cara kerja dari sistem *E-Village Budgeting* ataupun pada saat responden sedang melakukan *entry/input* data kedalam sistem *E-Village Budgeting*. Berikut ini adalah hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti.

Tabel 1
Data Hasil Observasi

No	Kecamatan	Desa	Identitas	Jabatan	P ₁	P ₂
1	Kalipuro	Ketapang	Rita Dian P	Operator E-VB	4	4
2	Giri	Grogol	Linda.S.Kom	Bendahara	5	4
3	Glagah	Kampunganyar	Defia	Operator E-VB	5	4
4	Kabat	Kalirejo	Hadi	Operator E-VB	4	4
5	Licin	Tamansari	Wiji Astuti	Bendahara	5	5
6	Songgon	Parangharjo	Weni	Bendahara	-	-
7	Sempu	Tegalarum	Wiwik	Bendahara	5	5
8	Kalibaru	Kalibaru Wetan	Kusnaini Adani	Bendahara	4	4
9	Glenmore	Tegalharjo	Riswanto	Operator E-VB	5	4
10	Singojuruh	Gumirih	Sumarjono	Sekretaris Desa	-	-
11	Rogojampi	Gitik	Imam Masud	Kaur Pemerintahan	4	4
12	Srono	Sukonatar	Fathur	Sekretaris Desa	5	5
13	Genteng	Stail	Eka Wahyuni	Bendahara	4	4
14	Gambiran	Jajag	Lina Kusuma	Bendahara	-	-
15	Cluring	Kaliposo	Khairul Huda	Operator E-VB	-	-
16	Muncar	Tambakrejo	Agus Supriyono	Sekretaris Desa	4	4
17	Tegalsari	Tegalsari	Bunahar	Sekdes	4	4
18	Purwoharjo	Karetan	Luis Kukuh T.	Operator E-VB	-	-
19	Bangorejo	Sambimulyo	Syafaat	Kaur Pemerintahan	5	4
20	Tegaldlimo	Kedungasri	Mukti	Operator E-VB	4	4
21	Siliragung	Kesilir	Nisa	Operator E-VB	5	4
22	Pesanggaran	Kandangan	Devi Dwi .I.	Operator E-VB	4	4
Nilai Total					75	69
Nilai Rata-Rata					4.4	4.1

Hasil Olah Data 2018

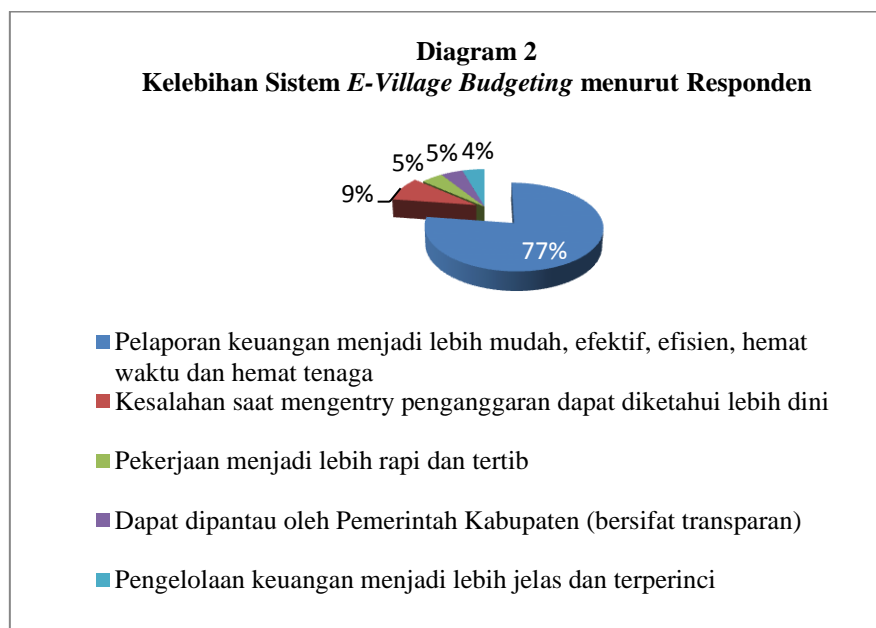
Pada saat melakukan observasi, peneliti melihat dari segi kemahiran dalam menjalankan dan menjelaskan sistem *E-Village Budgeting* yang dilambangkan dengan (P₁) dan pengambilan keputusan/tindakan pada saat mengalami kesulitan/kendala di dalam sistem *E-Village Budgeting* yang dilambangkan dengan (P₂) dengan skala penilaian 1-5 dengan keterangan skor 1 = Sangat Kurang, 2 = Kurang, 3 = Cukup, 4 = Baik, 5 = Sangat Baik. Berdasarkan hasil perhitungan, maka diperoleh nilai rata rata 4,4 untuk penguasaan sistem aplikasi *E-Village Budgeting* dan rata rata nilai 4,1 untuk pengambilan tindakan pada saat ada suatu kendala. Dengan nilai rata-rata tersebut maka dapat diketahui bahwa sebagian besar perangkat desa telah bisa menjalankan sistem *E-Village Budgeting* dengan baik dan cukup menguasai sistem ini. Dan, pada saat terjadi kendala di dalam sistem, sebagian besar bendahara/operator langsung mengambil tindakan yang nyata pada saat terjadi kendala atau kesalahan saat melakukan input data ke dalam sistem. Sebagian besar perangkat desa saat mengalami beberapa kendala atau sedikit kesalaahn teknis saat melakukan input data, mereka mengambil tindakan untuk menghubungi staf khusus yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui telepone atau aplikasi WhatsApp. Pada saat melakukan penelitian, hanya ada beberapa desa saja yang tidak bisa dilakukan observasi dikarenakan

saat itu ada pemadaman dan sistem yang mengalami pembaruan antara tahun 2017 dengan 2018 sehingga pada saat itu belum bisa diakses.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penerapan sistem aplikasi *E-Village Budgeting* bisa dibilang sudah berhasil. Keberhasilan dalam penerapan sistem *E-Village Budgeting* ini tidak lain karena keseriusan dan kegigihan pada aktor yang terlibat di dalam mempelajari dan memahami sistem *E-Village Budgeting*.

Kelebihan Sistem Aplikasi *E-Village Budgeting*

Setiap lahirnya suatu inovasi, diharapkan dapat memberikan kelebihan atau manfaat yang jauh lebih banyak dibandingkan sebelum inovasi itu ada dan diterapkan. Sejak awal diterapkannya aplikasi *E-Village Budgeting* hingga saat ini, setidaknya ada beberapa manfaat yang dirasakan bagi pemerintah desa, maupun bagi pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang dapat dilihat melalui diagram berikut :



Berdasarkan penelitian, dapat diketahui bahwa ada beberapa manfaat yang dirasakan oleh aparatur pemerintah desa. Berikut ini adalah penjelasan dari manfaat yang dirasakan oleh pemerintah desa :

- 1) Membuat Pelaporan Keuangan menjadi lebih mudah efektif, efisien, hemat waktu dan hemat tenaga.

Dimana sebanyak 77% atau 17 dari 22 responden yang ada, berpendapat bahwa dengan adanya sistem aplikasi *E-Village Budgeting* ini memberikan kemudahan di dalam pelaporan keuangan yang menjadi lebih mudah, efektif, efisien, hemat waktu dan hemat tenaga. Hal ini karena dengan adanya sistem *E-Village Budgeting* semua laporan keuangan dilakukan melalui sistem ini.

- 2) Kesalahan saat membuat pelaporan keuangan dapat diketahui lebih awal.

Sedikitnya 2 dari 22 atau 9% responden beranggapan bahwa adanya sistem aplikasi *E-Village Budgeting* membantu mereka mengetahui kemungkinan terjadinya kesalahan pada saat penyusunan pelaporan keuangan secara lebih dini. Dimana, saat melakukan *entry* atau *input* data penatausahaan ke dalam sistem aplikasi *E-Village Budgeting* apabila ada kesalahan atau ketidaksesuaian dengan perencanaan akan dapat dideteksi

dan bisa diketahui lebih awal sehingga bedahara akan dapat mengambil tindakan secara langsung untuk memperbaiki kesalahan yang ada.

3) Pekerjaan menjadi lebih rapi dan tertib.

Setidaknya terdapat 1 dari 22 atau 5% responden yang beranggapan bahwa adanya sistem aplikasi *E-Village Budgeting* membuat pekerjaan dalam menyusun pengelolaan keuangan desa menjadi lebih rapi dan tertib. Dengan adanya sistem aplikasi *E-Village Budgeting* pelaporan keuangan desa menjadi lebih tertib dan rapi.

4) Bersifat transparan dan dapat dipantau oleh pemerintah Kabupaten.

Setidaknya, terdapat 1 dari 22 atau 5% responden yang telah di wawancarai, beranggapan bahwa sistem aplikasi *E-Village Budgeting* menjadikan pengelolaan keuangan desa menjadi lebih transparan, hal ini karena dengan adanya sistem *E-Village Budgeting*, keuangan desa dapat dipantau secara langsung oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, melalui beberapa SKPD yang berwenang.

5) Pengelolaan keuangan menjadi lebih jelas dan terperinci.

Sedikitnya terdapat 1 orang dari 22 atau 4% responden yang telah diwawancarai menyatakan bahwa dengan adanya sistem aplikasi *E-Village Budgeting* menjadikan pengelolaan keuangan lebih jelas dan terperinci.

Berdasarkan pendapat dari ke-22 responden mengenai kelebihan dari adanya sistem *E-Village Budgeting* tersebut, dapat di kerucutkan kembali menjadi beberapa manfaat. Manfaat yang bisa dirasakan antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Kemudahan di dalam proses perencanaan dan penatausahaan keuangan desa;
- 2) Efisiensi dan efektifitas di dalam pengelolaan keuangan desa
- 3) Kemudahan di dalam proses pengendalian terkait dengan pemanfaatan APBDesa,
- 4) Kemudahan di dalam menyajikan data keuangan ataupun dalam perumusan kebijakan.

Kekurangan Sistem Aplikasi *E-Village Budgeting*

Lahirnya suatu inovasi, diharapkan dapat memberikan kelebihan atau manfaat yang lebih banyak daripada kekurangannya. Namun, suatu sistem yang baru saja dibuat dan di terapkan pasti memiliki kekurangan tidak terkecuali dengan sistem aplikasi *E-Village Budgeting*. Sejak awal penerapan sistem aplikasi *E-Village Budgeting* hingga saat ini, setidaknya ada beberapa kekurangan yang dirasakan oleh aparatur desa. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, beberapa kekurangan yang ada di dalam sistem aplikasi *E-Village Budgeting* ini seperti : *Pertama*, terdapat 2 dari 24 responden atau sebanyak 9% responden menilai kendala utama yang dialami di dalam penerapan sistem aplikasi *E-Village Budgeting* ini adalah masalah jaringan internet yang masih sulit. *Kedua*, 1 dari total 22 atau sebesar 5% responden berpendapat bahwa penghitungan pajak dalam sistem *E-Village Budgeting* masih dilakukan secara manual baru kemudian di *entry* atau di *input* ke dalam sistem tidak seperti penghitungan pada pelaporan keuangan yang sudah otomatis. *Ketiga*, 1 dari 22 responden atau setara dengan 5% yang berpendapat bahwa sistem aplikasi *E-Village Budgeting* kurang sederhana yang dikarenakan terdapat banyak kamar yang ada di dalam sistem *E-Village Budgeting*. *Keempat*, terdapat 1 dari 24 responden atau setara dengan 4% yang berpendapat bahwa kode rekening yang ada di dalam sistem *E-Village Budgeting* kurang spesifik.

Perbedaan Sebelum dan Setelah Sistem Aplikasi *E-Village Budgeting*

Dalam penerapan sebuah sistem baru, sudah bisa dipastikan akan ada perbedaan antara sebelum dan sesudahnya. Tidak terkecuali dengan penerapan sistem aplikasi *E-Village Budgeting* ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan dengan melihat

perbedaan dari kondisi awal sebelum diterapkannya sistem *E-Village Budgeting* dengan Kondisi setelah diterapkannya sistem *E-Village Budgeting*, penulis kelompokkan menjadi beberapa perbedaan yang disajikan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini :

Tabel 2
Perbedaan sebelum dan setelah sistem aplikasi
***E-Village Budgeting* diterapkan menurut responden**

Kondisi Sebelum menerapkan <i>E-Village Budgeting</i>	Kondisi setelah menerapkan <i>E-Village Budgeting</i>
1. Sistem keuangan desa dilakukan secara manual 2. Banyak pekerjaan yang harus diselesaikan 3. Waktu pengerjaan pelaporan keuangan sering molor	1. Sistem keuangan desa dilakukan melalui sistem secara otomatis 2. Waktu pengerjaan pelaporan keuangan menjadi lebih mudah dan cepat, sehingga pelaporan keuangan dapat selesai tepat waktu. 3. Lebih efektif dan efisien.

Penilaian Masyarakat terhadap Pemerintah Desa

Suatu inovasi akan dapat dikatakan berhasil apabila inovasi tersebut bisa dilaksanakan dengan baik dan memiliki nilai tambah atau manfaat yang dirasakan secara langsung. Untuk bisa menilai besarnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, peneliti melihat dari berbagai aspek seperti tingkat kepuasan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Untuk tingkat kepuasan dilihat dari aspek kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan, program kegiatan, pembangunan infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan SDM masyarakat. Sedangkan untuk melihat tingkat kepercayaan masyarakat dengan pemerintah desa, dilihat dari aspek transparansi pemerintah desa dengan masyarakat,

Berdasarkan hasil pengolahan data mengenai tingkat kepuasan masyarakat, diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Pertanyaan	1	2	3	4	5	6	7
Total per unsur	338	340	349	286	272	364	345
NRR	3.1	3.1	3.2	2.6	2.5	3.3	3.1
NRR x 1/7	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4
Nilai Indeks	3.0						
Indeks Kepuasan	74.5						

Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan maka didapatkan besaran skor indeks kepuasan masyarakat terhadap pemerintah desa sebesar 74,5 yang jika dibulatkan menjadi 75 sehingga bisa diperoleh simpulan bahwa kinerja pemerintah desa secara keseluruhan sudah baik. Nilai ini didapat dari hasil penelitian yang dilakukan kepada masyarakat desa yang bersangkutan dengan memberikan 7 pertanyaan mengenai kinerja pemerintah desa hingga program pembangunan desa. Berdasarkan hasil tersebut maka bisa disimpulkan bahwa secara keseluruhan, masyarakat sudah puas dengan kinerja pemerintah desa saat ini. Ini bisa terlihat dari tingkat kepuasan dimasing-masing indikator kepuasan

masyarakat, mulai dari tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah desa, tingkat kepuasan terhadap pembangunan infrastruktur desa, tingkat kepuasan terhadap pembangunan ekonomi, tingkat kepuasan terhadap upaya peningkatan sumberdaya manusia, tingkat kepuasan terhadap fasilitas pendidikan, tingkat kepuasan terhadap kualitas pelayanan kesehatan serta tingkat kepuasan terhadap program pembangunan desa yang masing-masing telah memperoleh penilaian yang baik dari masyarakat.

Sedangkan hasil pengolahan data mengenai tingkat kepercayaan masyarakat, diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4
Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah Desa

Pertanyaan	U1	U2
Total per unsur	341	309
NRR	3,1	2,8
NRR x ½	1,55	1,4
Nilai Indeks	2,9	
Indeks partisipasi	73,8	

Hasil Pengolahan Data 2018

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan maka didapatkan besaran skor indeks kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sebesar 73,8 yang jika dibulatkan menjadi 74. sehingga bisa diperoleh simpulan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa secara keseluruhan sudah baik. Ini bisa dilihat dari masing-masing indikator kepuasan masyarakat yang dinilai mulai dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan tingkat transparansi pemerintah desa. Dilihat dari kedua indikator kepercayaan yang dinilai, bisa diketahui bahwa masing-masing indikator telah memperoleh penilaian yang baik dari masyarakat. Sebagian masyarakat sudah puas dengan pemerintah desa saat ini yang dinilai lebih transparan daripada sebelum-sebelumnya. Hal ini dikarenakan hampir setiap kegiatan terutama kegiatan pembangunan, pemerintah mencantumkan besaran anggaran yang dikeluarkan di dalam proyek tersebut hal ini lah yang menjadikan tingkat kepercayaan masyarakat yang sudah mulai meningkat.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sistem aplikasi *E-Village Budgeting* sebagai sebuah inovasi baru di dalam tata kelola keuangan pemerintah desa bisa dibilang sudah berhasil. Keberhasilan dalam penerapan sistem *E-Village Budgeting* ini tidak lain karena keseriusan dan kegigihan pada aktor yang terlibat di dalam mempelajari dan memahami sistem *E-Village Budgeting*. Berdasarkan observasi yang dilakukan terhadap aparatur pemerintah desa, peneliti melihat semua aparatur pemerintah desa sudah bisa menjalankan sistem *E-Village Budgeting* dengan baik dan cukup menguasai. Dan apabila terjadi masalah di dalam sistem, pemerintah desa langsung menghubungi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dinas Komunikasi dan Informasi tergantung pada masalah yang dihadapi.

Ada banyak manfaat atau kelebihan yang ada dibalik sistem aplikasi *E-Village Budgeting* seperti : 1) Pelaporan keuangan menjadi lebih mudah, efektif, efisien, hemat waktu dan hemat tenaga; 2) Kesalahan pada saat melakukan *entry* data dapat diketahui lebih awal; 3) Pekerjaan menjadi lebih rapi dan tertib; 4) Bersifat transparan; serta 5) Pengelolaan

keuangan lebih jelas dan terperinci. Perbedaan mendasar antara sebelum dan setelah diterapkannya sistem aplikasi *E-Village Budgeting* adalah terletak pada pola perencanaan program kegiatan desa menjadi lebih terarah daripada sebelumnya, pengelolaan keuangan desa yang dilakukan menggunakan sistem dan *online* sehingga, di dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif dan efisien, transparan, pencairan anggaran menjadi lebih terkontrol dan lebih mudah dilakukan pengendalian internal antara Desa dengan Kecamatan ataupun Kabupaten.

Sistem aplikasi *E-Village Budgeting* ini masih memiliki kekurangan terutama masalah *server* yang hanya ada di pusat kota Banyuwangi, sehingga untuk desa-desa yang letaknya jauh dari pusat kota, terkadang jaringannya kurang stabil, terutama saat-saat banyak aparatur desa yang menggunakan aplikasi *E-Village Budgeting* secara bersamaan. Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Banyuwangi diharapkan dapat meningkatkan/menambah jumlah *server* yang ada agar kedepannya sistem aplikasi *E-Village Budgeting* dapat dioperasikan dengan sangat baik walau banyak yang mengakses sistem aplikasi *E-Village Budgeting*. Kedepannya, diharapkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi lebih meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran untuk kegiatan non fisik seperti pelatihan, pemberdayaan untuk meningkatkan sumber daya masyarakat desa. Hal ini perlu dilakukan karena untuk saat ini pengawasan yang ketat hanya dilakukan untuk pembangunan fisik saja melalui <http://ems.banyuwangikab.go.id> sedangkan untuk pembangunan non fisik kurang mendapatkan perhatian yang lebih.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo, 2011, *Manajemen Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Agus, Erwan P., dan Dyah Ratih S, 2012, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi di Indonesia*, Yogyakarta: Gava Media.
- Anderson, James E, 2006, *Public Policy Making: An Introduction*, Boston: Houghton Mifflin Company.
- Bok, D. 1997. *Measuring the Performance of Government : In Why People Don't Trust Government?* Nye, S Yoseph P.D Zelikow and De King (eds) Cambridge : Harvard University Press.
- Bryant, Coralie dan White, Lousie (1987), *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*, (terjemahan), LP3ES, Jakarta, Bab 7.
- Bungin, M. B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chhotray, V. & Stoker, G, 2009, *Governance Theory and Practice: A Cross-Disciplinary Approach*, Palgrave Macmillan, Hamshire and New York.
- Creswell, J.W. (2010). *Research design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N (1994), *Public Polycy Analysis: An Introduction*, Prentice-Hall International, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Dwiyanto, Agus, dkk, 2002, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit PSKK-UGM

- Eggers, William D. & Singh, Shalabh Kumar, 2009, *The Public Innovator's Playbook: Nurturing bold ideas in government*, Deloitte, Harvard Kennedy School of Government.
- Evans, J.P., (2012) *Environmental governance*. London: Routledge.
- Fukuyama, E. 1995. *The Social Witness and The Creations Of Prosperity*. New York : Free Press
- Gay, LR, Geoffrey E. Mills and Peter Airasian. 2009. *Educational Research, Competencies for Analysis and Application*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Given, Lisa M. (editor). (2008). *The Sage encyclopedia of qualitative research methods*. Thousand Oaks: Sage.
- Glyn Davis, Michael Keating (eds), *The Future of Governance: Policy Choices*, Allen and Unwin, Sydney, 2000, h.3.
- Hardiyansyah, (2011). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Gava Media.
- Indrajit, Richardus Eko. (2002). *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Jakarta: Andi Offset.
- Munandar, 1865, *Budgeting*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta
- Ocampo. 2006. *Congratulatory Message : The Regional Forum og Reinventing Government in Asia Seoul, Korea*
- Pranarka dan Vidyandika Moeljanto. 1996. *Pemberdayaan (Empowerment) dalam Pemberdayaan , Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS
- Randall B, Ripley dan Grace A, Franklin (1982). *Bureaucracy and Policy Implementation*, Homewood, Illiois: The Dorsey Press, hlm 4.
- Rewansyah, Asmawi. 2011. *Pedoman Monitoring dan Evaluasi*. Jakarta
- Rosyada, Dede, dkk, 2003, *Demokrasi Hak Azazi Manusia dan Masyarakat*, Jakarta.
- Sabarno Hari. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sangkala.2013. *Innovative Government*, Yogyakarta: Capiya Publishing.
- Sarundajang, S.H. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Kata Hasta Pustaka
- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung, CV. Mandar Maju.
- Sevilla, Consuelo G. et. al (2007). *Research Methods*. Rex Printing Company. Quezon City.
- Siau, K., dan Long, Y. 2009. *Factors impacting e-government development. Journal of computer information system*. Fall
- Subarsono, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Sumarto, 2009, *Inovasi, partisipasi dan good governance. 20 Prakarsa inovatif dan partisipatif di Indonesia*, Yayasan Obor, Yogyakarta.
- Sundoyo. 2009. *Jurnal Hukum Kesehatan, Biro Hukum dan Organisasi Setjen Departemen Kesehatan RI*. Jakarta
- Suwarno, Yogi, 2008, *Inovasi di Sektor Publik*, Jakarta: STIA LAN
- Taufiq, Ahmad, *Modul Sampling dan Analisa Data*, Universitas Diponegoro, 2014
- Todaro, P Michael.2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ke-3* Jilid 1. Erlangga. Jakarta
- Winarno, Budi, 2014, *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. CAPS (Center of Academic Publishing Service), Yogyakarta
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Zuhriyati, Erni dkk. 2012, *Kepemimpinan Transformatif Dalam Inovasi Pemerintah di Pemerintahan Kota Yogyakarta di Era Herry Zudianto*. Yogyakarta: JKSG.

Jurnal

- Arsiyah, dkk. 2009. Penelitian mengenai *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa*. <http://download.portalgaruda.org/> diakses pada 15 Mei 2018.
- Daniel Hary Prasetyo, *Penerapan E-Budgeting pada Proses Pembuatan Rencana Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Surabaya* dalam <http://mmt.its.ac.id/publikasi/?p=762> diakses pada 2 November 2016
- Lita Khaerunisa Nugraheni, *Analisis Proses Penyusunan E-Budgeting Pemerintah Provinsi DKI Jakarta*. Vol 4, No 02 (2016) dalam http://journal.bakrie.ac.id/index.php/jurnal_ilmiah_ub/article/view/1667 diakses pada 2 November 2016
- Santoso, Urip dan Yohannes Joni Pambelum. 2008. *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Mencegah Fraud*. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 4, No. 1, pp. 14-33.
- Yuwono, Teguh dan Abdulrahman, Wachid. 2016. Laporan Penelitian: *Inovasi Tata Kelola Pemerintahan: Pekalongan Sebagai Kota Kreatif UNESCO*".

Peraturan

- Inpres No.3 Tahun 2003. Pemerintah Republik Indonesia
- Inpres No.6 Tahun 2001. Pemerintah Republik Indonesia
- Perbub Banyuwangi No. 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa I Kabupaten Banyuwangi.